

Bagaimana Posisi dan Peran Universitas di Indonesia pada Jaman Ini?¹

Dr. G Budi Subanar²

1. Pada umumnya lembaga pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada satu sisi, dalam lingkup eksternal sebagai konteks jaman berhadapan dengan berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan sarana teknologi komunikasi dengan *artificial intelligence*-nya, komodifikasi pendidikan (anak miskin tidak bisa sekolah), pasar tenaga kerja, ketiganya ada di dalam lingkup gerak globalisasi. Pada sisi lain, pada lingkup kelembagaan berhadapan dengan lingkup manajemen dan tuntutan finansial kelembagaan, profesionalitas pendidik, profil mahasiswa yang ada dan sejumlah perkara lain. Pada sisi idealnya, tujuan pendidikan sebagai komunitas akademik dengan 3 unsur di dalamnya (kompetensi, etos, komunitas) terarah pada pembentukan generasi muda yang handal berbekal nilai - nilai sebagai manusia bermartabat dalam menghadapi tantangan jaman. Bagaimana ketegangan berbagai faktor di atas diurai dan didialogkan sehingga menghasilkan imajinasi yang mengarahkan untuk berdinamika.
2. Sebagai universitas, pertama-tama disadari bahwa tanggung jawab utama adalah untuk mendidik para mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan (dasar dan terapan), mencari (nilai-nilai) kebenaran (yang akan menjadi landasan dan orientasi etis dalam berbagai ranah kehidupan), dan memperkokoh hidup intelektual (pengajar dan alumni). Dengan demikian, ukuran keberhasilan universitas ditempatkan pada pelaksanaan dari tanggung jawab tersebut.

Secara spesifik pada masing-masing universitas, rumusan umum tersebut akan memperoleh penekanan kekhasan pada pokok-pokok tertentu. Barangkali terkait dengan mahasiswa akan menjadi sarana yang “memberi pengaruh pada hidup para mahasiswanya, dan menjadi saluran besar untuk peningkatan sosial”. Pada tingkat struktural dirumuskan mengusahakan “kegiatan yang memberi sumbangan dengan membahas tentang: arah dan masa depan ekonomi dan politik, makna eksistensi manusia, permasalahan etika jaman ini,

¹ Presentasi dalam Seminar “Aktualisasi Nilai-nilai Etika dan Budaya di Perguruan Tinggi”, Ukrida, Jakarta, 18 Janunari 2018

² Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

pembentukan budaya". Pada masa sekarang, usaha tersebut ditempatkan dalam konteks baru yang menghadang perutusan kita ditandai dengan adanya perubahan besar, konflik tajam, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Sekaligus berada di tengah dunia baru dalam komunikasi instan dan teknologi digital, pasar dunia, dan cita-cita universal demi perdamaian dan kesejahteraan. Dengan demikian, kita menghadapi tumbuhnya berbagai tegangan dan paradoks.

3. Komunitas akademik merupakan penopang utama di dalam universitas yang memiliki prinsip-prinsip khusus sebagai dasar keberadaan dan keberlangsungannya. Pertama, *scholarship* (keserjanaan, intelektual) terkait etos dan komitmen anggota yang terlibat di dalamnya; kedua, *science, knowledge* (pengetahuan) sebagai bidang yang digumuli. Pada praktiknya digumuli pada berbagai tingkat komunitas yang menjadi tempat pergumulannya. Demikian menjadi lengkap dari pemahaman atas universitas sebagai institusi, dengan komunitas akademik di dalamnya.
4. Untuk mencermati secara lebih komprehensif terhadap hal di atas, perlu disampaikan satu pandangan yang mendalami dan melengkapi hal tersebut. Uraian ini didasarkan pada dokumen yang menempatkan posisi dan peran Universitas memasuki abad XXI
 - *Kajian dari World Bank.*³ Ini perlu dikemukakan dengan tiga alasan:
 - 1) Posisi World Bank terhadap pendidikan; World Bank berdiri pasca Perang Dunia II untuk keluar dari krisis. Pembangunan diarahkan pada bidang material. Karena tidak berhasil lalu diarahkan pada bidang pendidikan yang menggerakkan keahlian dalam membangun masyarakat. Dan diterapkan kepada Negara-negara yang finansial tergantung pada World Bank.
 - 2) Mewakili dan komprehensifnya kajian; meliputi sejumlah hal terkait dengan bidang manajerial, profil tenaga pengajar dan mahasiswa, sumbangan pengetahuan yang dihasilkan.
 - 3) Rekomendasinya akan mempengaruhi kebijakan UNESCO.
5. Harapan dan catatan ini diketengahkan supaya tidak masuk jebakan
 - Catatan dari pendidikan kritis. Seiring dengan perkemngangan kesejahteraan, Universitas berhadapan dengan tradisi kredit. Jangan sampai lembaga pendidikan tinggi menjadi bagian yang menyebarkan mentalitas kredit,

³ Michael Gibbons, *Higher Education Relevance in the 21 Century*, Education the World Bank, 1998

- konsumsi.⁴ Bukannya menjadi lembaga yang mencetak kader yang berorientasi produksi, kreatif mencipta dan menggerakkan.
- Dengan demikian, ada Orientasi nilai yang perlu di jarkan dan dipraktikkan di dalam lingkup kecil komunitasnya. Pada tahap berikutnya akan mencari penerapannya di dalam fase keterlibatan selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikannya di lembaga pendidikan tinggi.
6. Menempatkan pendidikan tinggi di Indonesia
- Dinamika posisi dan peran universitas di Indonesia. Produk kolonial dan pasca kolonial. Kemunculan universitas di Indonesia – a) untuk mencukupi kebutuhan Negara baru b) perluasan keberadaan lembaga pendidikan tinggi di berbagai daerah. Dalam kerangka sosiologi gerakan, tahap dinamika gerakan dari embrional dan seterusnya ditempuh melalui proses pentahapan a) periode embrional, b) periode institusionalisasi, c) perkembangan dan d) periode krisis.
7. Sejarah sistem pendidikan kita akan selalu menyisakan masalah karena keberadaannya bermula dari sebuah mitos sejarah pendidikan yang tidak diciptakan untuk menghasilkan pengetahuan, apalagi untuk membentuk sebuah sistem kebangsaan yang bermuara pada pikiran untuk menyusun Negara sebagai sebuah reinkarnasi meleburnya seluruh kepentingan bersama. Hal ini bisa dimengerti karena sejak awal pendidikan adalah representasi dari sebuah perjalanan sejarah sebagai berikut:
- Mitologi pendidikan yang berawal dari sejarah pendidikan nasional dimana proses pendidikan adalah mengisi birokrasi colonial dengan pegawai local yang mampu berbahasa Belanda
 - Mitologi tersebut menyisakan cetak biru bahwa pendidikan adalah cara jitu untuk menjadi priyayi (kelompok birokrasi yang memiliki akses pada kekuasaan pemerintahan dan bukan pada kekuasaan kenegaraan)
 - “Priyayi” bukan sebagai kelas atau golongan pembaharu akan tetapi sebagai sebuah unit kesatuan cara hidup yang kemudian membentuk menjadi elite Nasional pada awal pembentukan sejarah kebangsaan Indonesia
8. Dalam kerangka mitologi tersebut, sistem pendidikan yang berkembang akan selalu membawa penyakit bawaan yang mewujud pada mentalitas berikut:

⁴ H. Giroux, The University Corporate

- A. Minder pada kekuatan asing (utamanya kulit putih, kemudian pada kekuatan asing apa saja yang dianggap secara “uang” memiliki superioritas terhadap kita); dan instrument mental yang akan selalu meletakkan bangsa Indonesia dibalut oleh kemiskinan, celaknya adalah bahasa asing (bisa bahasa Inggris, bahasa China, dsb). Dalam arti ini maka keIndonesiaan selalu akan terabaikan dengan sendirinya justru oleh perangkat yang paling sederhana: Bahasa
- B. Priyayi menjadi sebuah *template mental* akan selalu menyisakan ruang tentang kekuasaan, dan kekuasaan tersebut selalu direpresentasikan dalam sebuah organisasi cara hidup yang kemudian menjadi acuan bersama masyarakat. Masalah-masalah dalam pemerintahan perlu dimengerti dalam kerangka ini, termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang selama ini selalu dilihat dalam kerangka hukum
- C. Karena priyayi lebih dilihat sebagai sebuah cara hidup dan bukan alasan untuk hidup untuk merumuskan sistem kenegaraan dan kebangsaan sebagai struktur, sistem dan tempat hidup bersama, sistem pendidikan tidak akan pernah mampu menghasilkan produk pengetahuan dari kelompok yang bersekolah.
- D. Pengertian berpengetahuan dan pengetahuan itu sendiri akhirnya menyambung pada sejarah awal yang menyatukan inferioritas bahasa dan bangsa, bahwa sekolah (utamanya perguruan tinggi) adalah tempat paling bergengsi untuk membuat orang semakin dijauhkan dari tanahnya karena bisa berbahasa asing, dan belajar pengetahuan barat.

Kalau asal usul sistem pendidikan tinggi memang membawa penyakit bawaan seperti di atas, masih layakkah berharap terjadi sebuah mukjizat untuk memproduksi pengetahuan dari sistem pendidikan tinggi yang ada?

Tamasiswa baru memiliki pendidikan tinggi 33 tahun setelah berdirinya. Terhadap lembaga pendidikan tinggi, Ki Hadjar Dewantara berpandangan bahwa “Balai perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan negara yaitu sebagai syarat *pendorong, pembangun, dan pemeliharaan kebudayaan.*”⁵ Pendidikan yang ditempatkan dalam kebudayaan membawa implikasi panjang baik pada tataran konsep mau pun pelaksanaannya. Sampai periode memasuki kemerdekaan, usaha dalam pendidikan dan pengajaran mengambil bentuk gerakan revolusi. Ketika telah berada dalam wadah negara Indonesia, perjuangan di bidang pendidikan sebagai usaha kebudayaan menjadi gerak evolusi. Dalam pelaksanaan yang bertumpu pada asas demokrasi, pendidikan tak melulu menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan pihak partikelir yang memiliki keragaman

⁵ Cetak miring sesuai aslinya. *Pendidikan*, hal. 166

landasan ideologi keagamaan, kebudayaan, kemasyarakatan, atau ideologi praktis lainnya. Keikutsertaan pihak partikelir dimaksudkan untuk mendukung gerak penyebaran secara cepat atas penyelenggaraan pendidikan.⁶ Landasan-landasan konseptual yang kokoh tersebut mendasari keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kemunculan lembaga pendidikan tinggi, sejumlah isu yang terkait dengan situasi sosial dan masalah identitas muncul dalam forum, maupun tulisan yang diterbitkan. Hal-hal tersebut sejalan dengan tujuan didirikannya perguruan tinggi.⁷

Minat pada keterlibatan sosial para mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta telah tampak sejak semula. Pada pertengahan tahun 50-an sejumlah mahasiswa Universitas Gajah Mada dikirimkan ke berbagai daerah untuk memajukan kehidupan masyarakat. Suatu yang marak pada tahun 80-an adalah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Program tersebut bermaksud memisahkan mahasiswa dari keterlibatan dalam gerak politik kemasyarakatan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang melansir program tersebut menguraikan dasar pemikirannya.⁸ Banyak demo perlawanan dari mahasiswa terhadap kebijakan yang bermaksud membatasi keterlibatan mahasiswa dengan dunia di luar kampus itu. Tak terkecuali berbagai perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Dalam suasana tersebut, ada usaha untuk mencari program alternatif guna memberi aktivitas bagi para mahasiswa berupa program mahasiswa turun ke desa. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dimulai tahun 70-an, embrionya bermula dari Aksi Pengiriman Mahasiswa semula bersifat sukarela, menjadi wajib untuk mahasiswa. Dalam suasana pergolakan yang dialami mahasiswa, kota-kota yang menjadi tempat tujuan para mahasiswa menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada

⁶ Pendidikan, hal. 187

⁷ Prof Dr. Sardjito, Rektor pertama Universitas Gajah Mada menyatakan, "... tujuan Perguruan Tinggi ialah mendidik mahasiswanya untuk menjadi orang budiman (sarjana sujana-seniman manunggal) dan gunawan yang bersifat mandiri, berpribadi, dan bermasyarakat. Di sini saya dapat menambah, bahwa orang-orang yang keluar dari Universitas itu harus sudah dapat pengetahuan dan cukup cakap di kemudian hari memberi pimpinan di lapangan manapun untuk kepentingan nusa dan bangsa." Aslinya ejaan lama. 10 *Intelegensia tentang Pembangunan Masyarakat dan Negara Republik Indonesia*, Usaha Penerbitan Indonesia, 1950

Daoed Joesoef bermaksud mengembalikan kampus pada keadaan normal dengan acuan pada ilmu pengetahuan yang dimengerti sebagai produk, proses dan komunitas. Daoed Joesoef, *Aku dan Dia Memoar Pencari Kebenaran*, Jakarta, Kompas, 2006, hal. 618-623

pembangunan fisik. Untuk mengawal program pembangunan nasional tersebut, rejim yang berkuasa memberlakukan kontrol represif.⁹

Perkembangan Perguruan Tinggi

Kemunculan perguruan tinggi di Yogyakarta sebagaimana disebut di atas, sejalan dengan pengamatan yang dilakukan Douglas S. Paauw atas perguruan tinggi yang ada di Indonesia.¹⁰ Keberadaan universitas dikaitkan dengan pengetahuan dan keahlian yang sampai pada penerapannya untuk pembangunan nasional. Ketika sistem pendidikan kolonial sangat membatasi kemungkinan kaum pribumi untuk bisa mengaksesnya, segera setelah kemerdekaan Indonesia mulai menciptakan sistem dari dasar yang kecil yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda. Keterbatasan jumlah pengajar pribumi mulai diatasi dengan pengiriman tenaga untuk belajar di luar negeri. Keterbatasan jumlah mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi, mulai teratasi dengan penambahan jumlah perguruan tinggi. Dalam hal ini peran lembaga pendidikan swasta tampak menonjol karena jumlahnya menjadi berlipat-lipat dalam waktu yang relatif singkat.¹¹ Peningkatan jumlah perguruan tinggi tersebut memunculkan kendala kurangnya jumlah tenaga pengajar dan peneliti yang berkualitas. Dengan demikian terjadi peminjaman tenaga yang mengajar di berbagai tempat, sehingga tidak memungkinkan tersedianya pengajar purna waktu di suatu tempat untuk menjamin kualitas pengajaran dan penelitian. Di samping itu kurang ada sebuah penyebaran yang memungkinkan penyelenggaraan pendidikan tinggi berlangsung di berbagai tempat sehingga keberadaan lembaga pendidikan tinggi lebih terkonsentrasi di Jawa.

Pengamatan Douglas S Paauw juga mencatat banyaknya institut yang didirikan untuk memenuhi pengadaan tenaga guru. Gejala tersebut memperlihatkan sebuah kecenderungan pada ilmu terapan. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Daoed Joesoef mengusahakan pembedaan dan penekanan tugas universitas yang terkait

⁹ YB Mangunwijaya menunjukkan perbedaan kualitas pemimpin generasi 28 dan generasi 45. Angkatan 28 mengenyam pendidikan dari kaum humanis Belanda menjadi kelompok intelektual karena mempelajari berbagai ilmu sosial, ekonomi, dan psikologi. Mereka berasal dari kalangan elit, tapi berorientasi populis. Sedangkan angkatan 45 merupakan generasi didikan militer Jepang. Hasilnya adalah kelompok elit yang menggunakan logika militer. Daniel Dhakidae, "Mendidik manusia-manusia merdeka" dalam: *Mendidik Manusia Merdeka*. Romo Y.B. Mangunwijaya 65 Tahun, Interfidei dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm. 399-431

⁸ Douglas S. Paauw, "Universitas-universitas Indonesia: generasi pertama", dalam: *Prisma*, No. 2/1978, hal. 3-13

⁹ Untuk wilayah Yogyakarta, yang bermula dari usaha perintisan beberapa perguruan tinggi, dalam waktu 3 dasawarsa telah berkembang menjadi 52 perguruan tinggi dari tingkat universitas, institut, dan akademi. *Sejarah Kota Yogyakarta*, hal. 88

pada pengembangan *scientific knowledge*, disamping untuk mengembangkan *scientific spirit* yang merupakan prasyarat bagi terciptanya *scientific knowledge*. Sedangkan IKIP lebih diarahkan pada pemberian pengetahuan (*scientific knowledge*) disertai pembentukan *scientific culture* untuk para calon guru yang akan mendampingi murid yang belum memperoleh *scientific culture* dari keluarganya.¹²

Ada beberapa masalah lain yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia. Tonny D. Widiastono menyebutkan kenaikan jumlah mahasiswa yang menimbulkan masalah pengadaan sarana dan prasarana, perencanaan pengembangan, dan pengadaan tenaga dosen berkualitas. Di samping itu adanya ketergantungan perguruan tinggi di luar Jawa pada perguruan tinggi yang ada di Jawa.¹³ Di sisi lain, J. Drost, SJ melihat kecenderungan perguruan tinggi lebih merupakan pranata administrasi yang memayungi sejumlah bidang ilmu pengetahuan tanpa ada hubungannya. Satu kecenderungan lain yang dilihatnya adalah orientasi pragmatis. “... pendidikan tinggi yang mengambil sikap pragmatis mengubah sifat-sifat universitas. Universitas bukan lagi suatu lembaga yang mencita-citakan membentuk pribadi-pribadi yang dihayati oleh nilai-nilai universal melainkan sebuah sekolah kejuruan yang mendidik para mahasiswanya menjadi roda-roda dalam proses ekonomi dan teknologi.”¹⁴ Mengatasi permasalahan tersebut, J. Drost mengusulkan tidak melulu mendasarkan pada pemberian mata kuliah-mata kuliah dasar, melainkan pemilihan senat guru besar dan rektor perguruan tinggi yang memiliki kualifikasi ilmuwan. Dengan mengandalkan tenaga tersebut, J. Drost menyebutkan pengandaianya bahwa seorang ilmuwan mampu mendampingi mahasiswanya.

Dalam berbagai ketegangan tersebut, universitas perlu menjadi penjamin bagi nilai universal dan tradisi, sekaligus menegaskan sebagai pusat ilmu dan keterlibatan sosial. Berhadapan dengan kebutuhan pasar dan masyarakat, universitas perlu menempatkan diri sebagai: lembaga ilmiah dan pusat belajar agar mahasiswa memperoleh teori, metode riset lapangan dan ketrampilan mengajar, serta lembaga yang menawarkan kualifikasi kerja dikombinasikan dengan pengetahuan dan ketrampilan. Universitas juga merupakan pusat proses

¹⁰ Gagasan tersebut merupakan bagian dari keprihatinannya atas kenyataan bahwa dunia pendidikan di Indonesia belum memiliki konsep yang kuat sebagai arah orientasinya. Daoed Joesoef, *Aku dan Dia Memoar Pencari Kebenaran*, hal. 661-662

¹¹ Permasalahan jumlah mahasiswa masih dilihat dari segi jumlah kuantitatif, belum lagi kalau melihat kualitas lulusan SLTA yang masuk. Terkait masalah kedua lebih disebabkan karena yang membuat plot untuk perguruan tinggi di luar Jawa adalah para ahli yang berada di pusat kekuasaan. Tonny D. Widiastono, “Perguruan tinggi kita: persoalan-persoalan yang dihadapi”, dalam *Prisma* No. 1/1990, hal. 22-32

¹⁴ J. Drost, SJ, “Untuk apa perguruan tinggi didirikan?”, dalam: *Prisma* No. 1/1990, hal. 4

belajar seumur hidup, dan partner untuk jaringan kerja internasional.¹⁵ Dalam kebijakan yang tak berkesinambungan, tidak mudah bagi universitas untuk menjalankan fungsi tersebut.¹⁶

Dalam situasi saat ini, lembaga perguruan tinggi harus berhadapan dengan neoliberalisme yang menekankan pada sistem perdagangan pasar bebas.¹⁷ Artinya perguruan tinggi juga menghadapi ekspansi perguruan tinggi asing. Adakah gejala ini memperlihatkan wilayah pendidikan menjadi obyek pasar asing? Atau dengan mengacu pada persaingan yang kuat dan cepat, situasi tersebut justru memacu kemungkinan pengembangan perguruan tinggi?¹⁸ Dengan gejala sejumlah institut yang menjadi universitas, apakah dapat dikatakan kemudian lebih menekankan untuk bergerak pada pencapaian *scientific knowledge*? Dalam dinamika perubahan ke dalam, dan berhadapan dengan perkembangan di luar, menjadi semakin beratlah tugas perguruan tinggi untuk merumuskan orientasinya sampai pada tataran pelaksanaannya.

Pada sisi lain, kelompok intelektual yang pada mulanya bersama pihak lain menjadi bagian masyarakat yang bahu-membahu membangun “untuk nusa dan bangsa”, dalam perkembangannya justru mengebawahkan diri dalam afiliasi kelompok sehingga menjadi bagian tak terpisah dari rejim penguasa.¹⁹ Padahal ada arus besar globalisasi yang berpengaruh pada perubahan yang menantang bagi dunia pendidikan. Gejala tersebut membutuhkan pemikiran-pemikiran yang mendalam serta strategi untuk menghadapinya. Bagaimana hal-hal tersebut ditempatkan untuk melihat dinamika komunitas *learning community*? Dalam latar belakang politik Indonesia di masa transisi era reformasi yang ditandai dengan pergantian rejim, semua pihak perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk merumuskan kembali posisi dan peranannya.

Mempertemukan fungsi perguruan tinggi dalam keterlibatan sosial dan sebagai pusat belajar seumur hidup pada situasi aktual dengan perubahan yang berlaku di tengah masyarakat dengan beragam keadaan serta kebutuhannya, bukan merupakan perkara mudah. Untuk itu, melalui tinjauan beberapa gejala dan jejaring yang hidup di dalamnya, kiranya hal ini dapat sedikit memetakan

¹⁵ Jacques Delor, “Education: the necessary utopia”, dalam *Learning: The Treasure Within*, hal. 27-28

¹⁶ Setelah Daed Joesoef menerapkan program pemisahan kegiatan ilmiah dari kegiatan politik, Nugroho Notosusanto mengintrodusir pendidikan humaniora. Sedangkan Wardiman Djonegoro menekankan tenaga siap pakai dengan strategi *match and link* pada bidang pendidikan dan pengajaran. Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*, Magelang, Indonesiatara, 2004, hal. 133-138

¹⁷ Herry Priyono, ... *Anak Miskin tak Boleh Sekolah*, ...

¹⁸ Conny R Semiawan, *Pendidikan Tinggi Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*, Jakarta, Dirjen Dikti, 1999, hal. 150-156

¹⁹ Dhaniel Dhakidae, *Cendikawan dan Kekuasaan*, Jakarta, Gramedia,

bagaimana komunitas *learning society* berjalan. Di dalamnya kiranya terlihat permasalahan yang masih harus dihadapi.

Pendidikan Seumur Hidup yang Berkembang

Penjelasan di atas memperlihatkan dua dinamika berlainan. Di satu sisi, mengetengahkan gerakan mahasiswa ke luar lingkungan kampus, menjangkau masalah masyarakat warga. Di sisi lain, gerak perkembangan perguruan tinggi sampai pada keadaannya sekarang belum terkait dengan proses pendidikan seumur hidup. Apa cakupan belajar seumur hidup? Siapa terlibat di dalamnya? Bagaimana mekanismenya berjalan?

Dalam penyelenggaraan program pasca sarjana sering ditemukan jenjang usia mahasiswa yang beragam. Hal ini pun terjadi pada Universitas Sanata Dharma. Di dalam dua program studi pasca sarjana, terdapat keragaman rentang usia mahasiswa. Satu program studi memiliki rentang usia antara 20-an sampai 50-an. Artinya mahasiswa *fresh graduate* bercampur dengan yang sudah bertahun-tahun memiliki pengalaman kerja. Satu program lain, campurannya antara mahasiswa *fresh graduate* dengan yang telah berusia antara 60-70 tahun.

Ada dua motivasi berlainan dari mahasiswa usia 'lanjut' tersebut. Mereka yang masih memerlukan tambahan ilmu pengetahuan dan keahlian guna menunjang karir kerjanya dengan mereka yang bermaksud menyegarkan kembali pengetahuannya setelah memasuki usia pensiun. Pada kelompok yang terakhir ilmu pengetahuan yang ditimba tidak lagi dipergunakan untuk berkompetisi dalam lingkungan kerjanya. Kedua gejala demikian memperlihatkan bagaimana pendidikan seumur hidup dimaksudkan.

Kenyataan tersebut dapat ditempatkan pada pemahaman perkembangan masyarakat sangat mempengaruhi dunia pendidikan. William W. Harman memperlihatkan perkembangan industri dan teknologi yang memberi pengaruh pada pendidikan sejak rentang waktu yang lama.²⁰ Atas perubahan-perubahan yang terjadi, dia memperlihatkan salah satu perubahan di mana garis pisah antara pendidikan formal dan informal menjadi kabur sehingga pemisahannya bukan menyangkut kerja dan pendidikan, atau kerja dan waktu luang, melainkan kerja-pendidikan-waktu luang berhadapan dengan 'membunuh waktu'. Di sinilah pendidikan menjadi kegiatan hidup. Garis pemisah yang

²⁰ Willis W. Harman memperkirakan sejumlah perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat dalam beberapa fase. Dia memperbandingkan dua hal, yang berjalan seperti waktu yang telah terjadi dan yang mengalami perubahan drastis. Willis W. Harman, "The Nature of our changing society: implications for schools", dalam: *Curriculum and the Cultural Revolution*, David e. Purpel-Maurice Belanger, ed., Berkeley, McCutchan Publishing Corporation, 1972, hal. 20 (4-63)

kabur juga dikemukakan oleh Richard Edwards. Dalam membahas *learning society*, R. Edwards menunjukkan berbagai perubahan sebagai situasi di mana terdapat kesempatan untuk merumuskan ulang pemahaman pendidikan seumur hidup.²¹

Edwards berpendapat bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dia menunjuk perubahan di bidang ekonomi, budaya, teknologi, dan demografis. Dalam perubahan-perubahan yang saling berkontestasi, dia mencermati yang berlangsung di wilayah budaya. Pilihan tersebut dilakukan untuk menempatkan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang tanggap terhadap perubahan sekaligus memiliki keterarahan berdasar pada modal sosial dan kultural yang dimiliki serta arah ideal yang ingin dicapai.²² Pilihan tersebut penting mengingat pendidikan lebih diabdikan pada individu-individu yang berhimpun di dalam komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat. Pada gilirannya pendidikan juga terarah pada pemberdayaan masyarakat.

Ketika pendidikan seumur hidup dikaitkan dengan dunia kerja, Edwards melihat bahwa hal tersebut terkait dengan sebuah lingkup pasar. Itu berarti terkait dengan unsur kesiapan untuk berkompetisi sehingga orang mempunyai jaminan untuk menghadapi situasi yang ada. Hal ini akan menguntungkan pihak-pihak yang kuat dalam persaingan. Situasi ini sekaligus melanggengkan masyarakat yang terkotak-kotak dalam kerangka pola konsumsi. Di mana tempat individu mendapatkan kebebasannya? Di sisi lain, ketika pendidikan seumur hidup dikaitkan dengan masalah partisipasi di dalam lingkup sosial dan budaya, maka yang terjadi adalah jaringan belajar. Dengan adanya pengaruh globalisasi yang terkait dengan wilayah ekonomi, komunikasi, migrasi, dan sebagainya, permasalahan yang dihadapi terarah pada masalah gender, agama, etnis dan sebagainya.²³ Orang tidak bisa lagi memiliki pandangan tunggal tetapi akan memiliki perspektif yang meluas dan ada dalam keragaman.²⁴ Dalam situasi ini, pendidikan tidak lagi dilakukan melulu dengan

¹⁹ Richard Edwards, *Changing Places? Flexibility, Lifelong Learning and a Learning Society*, London, Routledge, 1997, hal. 29-66

²⁰ J. Muller meresahkan pendidikan yang diarahkan pada tujuan ekonomi sementara pembangunan struktur masyarakat dan banyak bidang lain yang terabaikan. Daoed Joesoef mengungkapkan hal senada prihatin pada kebijakan pembangunan yang berpusat pada ekonomi tanpa ditopang sistem pendidikan yang dilandasi konsep yang memadai. Johannes Muller, "Pendidikan untuk apa dan siapa?: pengintegrasian pendidikan dan pembangunan masyarakat di Indonesia", dalam *Prisma*, No. 11/1980, hal. 70-79. Daoed Joesoef, *Aku dan Dia Memoar Pencari Kebenaran*, hal. 602-606

²³ Richard Edwards, *Changing Places? Flexibility, Lifelong Learning and a Learning Society*, hal. 175-183

²⁴ Arjun Appadurai memperlihatkan bagaimana pengaruh globalisasi dapat ditempatkan pada lima horizon perubahan yang mencakup *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *finanscapes*, dan *ideoscapes*. Arjun Appadurai, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy" dalam *The Cultural Studies Reader*, Simon During (ed.), London Routledge, 1999, hal. 220-230

tatap muka tapi dijalankan dengan dukungan media komunikasi dan teknologi informasi. Dalam situasi ini perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kerangka pemahaman bagaimana relasi manusia dengan lingkungannya.²⁵ Terkait dengan ini, maka pendidikan seumur hidup melibatkan berbagai pihak sehingga memungkinkan orang untuk berinteraksi dengan lingkungannya seturut dengan tuntutan jaman.²⁶

Ada satu desakan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak lain guna menyikapi dan membantu masyarakat dalam berhadapan dengan budaya media di era informasi. Kendati pun berbagai komponen masyarakat telah mereaksi dan mendidik diri dengan berbagai cara. Tanpa keterlibatan dalam jaringan, lembaga pendidikan akan menjadi menara gading yang berdiri sendiri.

Dinamika pendidikan yang diselenggarakan lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan masyarakat, sekaligus menyimpan ketegangan antara lembaga pendidikan yang memisahkan diri dari masyarakat, dan lembaga pendidikan yang menyatukan diri sebagai bagian komunitas di dalam masyarakat.²⁷ Ketegangan dapat tercermin pada penciptaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (J. Drost lebih sering menyebut Kurikulum Bertujuan Kompetensi), dan Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam Manajemen Berbasis Sekolah pengujian atas nilai-nilai yang diajarkan akan melampaui batas kelas dan sekolah di mana para murid belajar. Demikian pun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi, J. Drost melihat orientasinya adalah pembentukan intelektualitas, yang ditopang oleh kedewasaan sehingga mampu melampaui lingkungan kelas dan sekolah dan mengintegrasikannya di dalam kehidupan yang lebih luas.²⁸ Syarat kedewasaan tersebut penting untuk tidak terjebak dalam sikap mengagungkan diri, dan perlunya kemampuan untuk menghubungkan diri dengan pihak-pihak lain.

Dalam lingkup komunitas dan masyarakat, kemampuan berjejaring tidak lagi terbatas pada individu melainkan antar lembaga pembentuk yang menjadi bagian masyarakat. Kendati pun yang terjadi adalah situasi kontrasnya. *Kerenggangan hubungan antarmanusia sebagai dampak era pascamodernisme merupakan tantangan paling besar dalam upaya pendidikan generasi muda. Tantangan ini tidak bisa dihadapi oleh salah satu sentra saja. Proses pendidikan kaum muda merupakan suatu usaha shared parenting (pengasuhan bersama) antara keluarga,*

²⁵ *Learning: The Treasure within*, hal. 49-50

²⁶ *Learning: The Treasure within*, hal. 99-110

²⁷ Fred M. Newmann-Donald W. Oliver, "Education and community", dalam: *Curriculum and the Cultural Revolution*, hal. 219-222

²⁸ J. Drost, SJ, *Dari MBK sampai MBS*, Jakarta, Kompas, 2005, hal. 3-8, 120-125

sekolah, masyarakat dan media.²⁹ Dalam dinamika *shared parenting*, perwujudan komunitas *learning society* dapat menemukan wujudnya secara menyeluruh. Dengan menunjuk pada 4 sentra untuk mengadakan *shared parenting* dalam pendidikan generasi muda, menjadi perlu keempat sentra tersebut saling berjejaring.³⁰

Ketika pendidikan seumur hidup membutuhkan usaha berjejaring, gerakan alternatif yang telah ada perlu mendapat dukungan. Orientasi pendidikan yang mengarah ekonomi liberal akan makin meninggalkan gerak lokal. Di sisi lain, jaringan masyarakat menawarkan alternatif untuk berorientasi pada proses yang membebaskan. Dalam gejala yang berlangsung ini, peran institusi negara ditempatkan. Institusi negara sebagai penanggung jawab utama memfasilitasi berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan, mewadahnya dalam struktur besar yang diikat oleh aturan main bersama yang dituang dalam undang-undang. Tidaklah berlebihan kalau ada mimpi-mimpi terhadap undang-undang pendidikan yang berlaku.³¹ Sebuah impian tentang undang-undang pendidikan yang berisi konsep dasar tentang pendidikan seumur hidup yang dinamis yang ditempatkan dalam landasan ideal dalam dasar negara, di mana semua pihak terlibat melalui berbagai lembaga yang terarah pada subyek utama pendidikan. Inilah yang membentuk dinamika pendidikan yang melibatkan seluruh komponen kehidupan masyarakat yang saling berjejaring.

9. Dinamikanya saat ini: Bagaimana posisi yang dapat diambil

Menempatkan Sejarah Pendidikan Tinggi Kristen di Indonesia. Di atas telah disebutkan hal mendasar keberadaan perguruan tinggi. Secara spesifik hal tersebut menjadi Latar belakang pendirian perguruan tinggi kristen di berbagai tempat, memiliki kekhasannya masing-masing. Ada yang bermula dari keprihatinan kelompok/komunitas misi tertentu, ada yang bermula dari inisiatif sekelompok ahli profesional, atau campuran keduanya. Di samping itu, masing-masing juga berada di dalam konteks masyarakatnya yang khas. Faktor semacam ini membentuk identitas dan spiritualitas yang khas bagi masing-masing perguruan tinggi.

²⁹ Anita Lie, "Pendidikan kritis dan transformasi masyarakat kewargaan", hal. 18-19

³⁰ Hal tersebut dinyatakan sebagai harapan ideal, sekaligus perlu menjadi catatan dalam berhadapan dengan carut marutnya situasi aktual dari berbagai komponen yang diharapkan tersebut.

"...saya bermimpi tentang UU Pokok Pendidikan yang sejati, yang komprehensif, yang menyentuh pengajaran dan pendidikan seutuhnya. Asal jangan menjadi etatisme absolut yang mau mengatur segala bentuk pendidikan. Kita tahu, menurut kesadaran paling modern bahkan pasca modern, pendidikan berjalan seumur hidup dan amat dinamis. Lembaga pendidikan adalah keseluruhan kehidupan masyarakat. Persis seperti yang dirumuskan Mukadimah UUD 45: mencerdaskan kehidupan bangsa. Formal, nonformal dan informal." YB Mangunwijaya, *Impian dari Yogyakarta*, hal. 109

10. Dalam perkembangannya sekarang, perguruan tinggi kristen semakin terbuka pada pembaruan berhadapan dengan masalah aktual bersama³²: kesenjangan kaya - miskin, relativitas nilai dalam masyarakat, pemerintahan yang bersih, akibat konflik dan kekerasan, masyarakat informasi dengan dampak-dampaknya, globalisasi yang memarjinalkan. ... Dalam lingkup dunia pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi kristen terlibat dalam keprihatinan yang muncul di dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan sistem pendidikan yang terus menerus perlu dikritisi.³³
11. Dalam pergumulan semacam itu, bagaimana pergulatan perlu dicerahkan? Hal tersebut menjadi tantangan merumuskan identitas yang terus dihidupi. Dalam berbagai perumusan tantangan di atas, terdapat satu undangan bagi perguruan tinggi kristen untuk membangun eklesiologi secara kontekstual. Sebagai komunitas kaum (beriman) profesional yang mengartikulasikan, memperdalam, dan memunculkan tantangan. Bertolak dari budaya dan peristiwa dunia sebagai sumber dasarnya. Melakukan usaha untuk berproses dengan memberi perhatian pada unsur-unsur:³⁴ 1) semangat dan pesan-pesan Injil; 2) tradisi Kristen yang telah berlangsung dalam sejarah; 3) lingkungan budaya - tempat berlangsungnya usaha; 4) perubahan sosial yang terjadi akibat proses teknologi modern atau perjuangan kelas bawah demi keadilan, dll.
12. Demikianlah perguruan tinggi kristen mengintegrasikan diri dalam pergulatan gereja di tengah masyarakat. Demikian pula, teologi (di mana orang beriman mempertanggungjawabkan perbuatannya) kiranya memberi pencerahan atas pergumulannya. Menunjukkan nilai dan menemukan makna tindakan, keterlibatan, pergulatan. Dan terus mengajak untuk menghadirkan gereja yang relevan, signifikan dan berdaya pikat. Tantangannya, seberapa jauh para pemikir mengadakan aksi turun lapangan (tidak tinggal di menara gading); dan seberapa perguruan tinggi kristen mengundang, menghadirkan mereka untuk menyegarkan pengharapan dan terus menghembuskan angin segar.

³² *Sejarah Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK). Dinamika Suatu Pergumulan Kerjasama*, Bab IV-V; Globalisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi: Tantangan dan Peluang bagi Perguruan Tinggi, APTİK, 2010

³¹ St. Sularto (ed), *Guru-guru Keluhuran. Rekaman Monumental Mimpi Anak Tiga Jaman*, Jakarta, Kompas, 2010; Prof Dr Winarno Surakhmad, MSc. Ed, *Pendidikan Indonesia Strategi dan Tragedi*, Jakarta, Kompas, 2009

³⁴ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, New York, Orbis Books, 1996

13. Ada tantangan sesat pikir: rancu antara acuan dan pengacuan

Istilah acuan dan pengacuan dikemukakan untuk memperlihatkan bagaimana standar diciptakan dan diacu. Pada satu sisi, acuan merupakan jabaran operasional visi. Berisi rujukan standar mutu, dan merupakan bagian dari jabaran operasional atau strategi implementasi visi universitas. Di sisi lain, pengacuan adalah praksis manajemen mencapai mutu sebagaimana dimiliki acuan. Merupakan proses mencapai standar mutu yang dirujuk. Keduanya dimaksudkan untuk menciptakan secara jelas batas ukuran kelayakan (*accountability*) universitas. Dalam batas ini, kelayakan universitas dapat diukur dari apakah pengacuan telah sejalan dengan acuan (*kelayakan proses*), dan apakah dipakainya sebuah acuan telah meningkatkan mutu-universitas (*kelayakan hasil*). Dengan demikian, uji kelayakan (hasil dan proses) universitas dalam kerangka acuan dan pengacuan adalah juga uji *feasibility* visi.

14. Dalam praktek pendidikan di Indonesia, J. Drost³⁵ menilai, terjadi inkonsistensi antara acuan dan pengacuan universitas. Awalnya adalah upaya meleburkan universitas ke dalam dinamika paradigmatis industri seiring dengan kebijakan politis industrialisasi Indonesia terutama pada dekade terakhir pemerintahan Soeharto. Ketika itu terciptanya *link* universitas dengan dunia industri dijadikan orientasi obsesif dengan tujuan agar lulusan universitas dapat segera *match* dengan dunia kerja sektor industri.

Sampai sekarang kita menyaksikan peninggalan pemikiran dan kebijakan yang memberi penekanan baru pada pentingnya bidang-bidang teknik dan eksakta lainnya. dan terjadi subordinasi kultural ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ada kalah dan menang gengsi antara kedua rumpun tersebut. Dengan kebijakan politik semacam itu, jelaslah bahwa universitas diharapkan/ diwajibkan menghasilkan lulusan yang siap dipakai oleh dunia industri. Visi universitas menjadi utilitarian. Hasilnya? Sarjana-sarjana universitas kita adalah keluaran dari sebuah sistem yang serba tanggung. Inkonsistensi acuan dan pengacuan menciptakan sebuah sistem yang tanggung yang akhirnya meluluskan sarjana-sarjana yang tanggung pula. Ada perubahan hubungan universitas dan dunia industri. Yang diharapkan adanya pengandaian kesetaraan universitas dan dunia industri, Tetapi yang terjadi adalah upaya universitas yang dikalahkan oleh keinginan dan orientasi dunia industri.

³⁵ Drost, J. "Kurikulum" dalam *Jurnal Arah Reformasi Indonesia* No. 5, Agustus 1999, hal. 53-81.

15. Semangat pragmatis tersebut terus berlanjut melandasi keseluruhan praktek penyelenggaraan universitas. Bagaimana mungkin seseorang menjadi ahli di suatu bidang ilmu dalam waktu relatif singkat? Dorongan untuk berhasil dalam waktu singkat memunculkan budaya instant. Orang potong kompas demi hasil “baik”. Terjadilah praktik mencontek di ruang-ruang ujian, demikian juga penjiplakan skripsi/tesis/disertasi, kemudian jual-beli ijazah dan gelar. Kelanjutannya merajalelalah korupsi: mulai ditanam di ruang ujian dan mentalitasnya berkembang di birokrasi-birokrasi. Ketepatan menjawab soal-soal ujian adalah satu-satunya ukuran keberhasilan, dan mengabaikan perlunya mencari konteks sebuah teori. Skripsi/tesis/disertasi menjadi bukti kepakaran, tetapi proses segala seluk beluk kesulitan dan perjuangan dalam menyusunnya. Tidak ditelmpatkan sebagai latihan kerja ilmiah (intellectual exercises) pada masing-masing jenjang S1-S2-S3. Yang menjadi orientasi prestise semu tentang penyandangan gelar-gelar akademik yang dapat diperjual belikan di berbagai tempat, dan diabaikan makna bahwa gelar akademik hanyalah simbol dari telah dilaluinya satu tahapan dari serangkaian proses membangun etos dan tradisi ilmiah.
16. Seakan-akan tindak mencontek di ruang-ruang ujian terkesan remeh dan klasik. Rentetannya, kita sekarang menyaksikan hilangnya orisinalitas dan kreatifitas kita sebagai bangsa. Kita miskin dengan hasil-hasil pemikiran orisinal, yang lahir dari kekritisian dan refleksi atas situasi kontekstual kita. Kreatifitas mati, sementara kelatahan hidup dan berkembang subur. Yang terjadi adalah meniru dan mengikuti apa saja yang dianggap umum. Anggapannya bahwa apa yang dianggap umum itulah yang semestinya. Tidak ada lagi daya untuk bertanya “mengapa” atas sesuatu. Kita kehilangan kemampuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”. Yang semula remeh dan klasik itu, kini tidak lagi remeh melainkan serius, dan aktual. Mencontek, yang semula dipahami hanya terjadi di ruang-ruang ujian, telah menjadi model budaya kita. Model budaya ini menghancurkan orisinalitas dan kreatifitas. Padahal upaya untuk menumbuhkan dan pengembangannya justru menjadi inti tujuan pendidikan.
17. Dalam realitas kekinian, hiperdinamika dunia kerja dan tekno-ekonomi memang sangat memicu perubahan-perubahan di dalam universitas. Dan perlu disadari bahwa visi universitas sangat potensial menjadi wilayah ambigu. Yang dibutuhkan, perlu adanya tetapan dasar di dalam proses penyelenggaraan universitas, yaitu tetapan yang dapat dipakai sebagai pedoman tentang

bagaimana universitas harus menyikapi berbagai perubahan tersebut. Ini dimaksudkan untuk tidak terjebak dalam kerancuan acuan dan pengacuan (*benchmark and benchmarking*).

18. Kemungkinan-kemungkinan yang perlu disadari pada 3 tingkat: dari lingkup institusi, korps civitas academica, dan alumni yang dihasilkan.

Pertama. Perkembangan tekno-ekonomi memicu ketidakjelasan visi universitas dengan tuntutan kualifikasi yang berubah-ubah. Di balik kualifikasi-kualifikasi ini ada upaya menciptakan ukuran tunggal keberhasilan pendidikan universitas, misalnya ukuran tentang kualifikasi-kualifikasi lulusan. Bagaimana memasukkan kekhasan yang diperjuangkan.

Untuk dapat bekerja lulusan universitas harus memenuhi kualifikasi tertentu, yang dibuat oleh dunia kerja berdasarkan perkembangan tekno-ekonomi, yang dewasa ini hanya mungkin terjadi karena dukungan modal yang kuat. Pertanyaannya, bebaskah modal dari kepentingan ideologis pemiliknya? Ketika seluruh dinamika universitas berada di dalam kerangka memenuhi kepentingan ideologis pemilik modal, apa dapat diandalkan dari proses pendidikan di universitas? Perlu diakui pengaruh kekuatan modal itu sebagai realitas kekinian yang tak terelakkan. Di sisi lain, kritik atasnya adalah tanggung jawab kekinian yang juga harus selalu dilakukan. Dengan demikian, harus ada paradigma lain diluar paradigma kapitalistis, di luar perhitungan untung-rugi ekonomi dalam penyenggaraan universitas.

Kedua. Tanpa visi yang jelas dan oleh kendali kekuatan modal, universitas berpotensi menjadi komunitas akademik tanpa identitas solid mutu keberadaannya. Tidak mengherankan Di Indonesia dewasa ini, akan ada pemangkasan sejumlah besar perguruan tinggi.

Ketiga. Ketiga, perlu dipikirkan apa yang membedakan lulusan universitas dengan lulusan lembaga kursus jika tolakan untuk mengukur kualitas mereka adalah keterampilan? Jika dalam hal *keterampilan* tersebut lulusan universitas tidak terbedakan dari lulusan lembaga kursus, sementara ada kecenderungan universitas sendiri telah menjadikan *keterampilan* sebagai ukuran kualitas lulusannya, lalu apa wibawa universitas dibandingkan lembaga kursus?
